

PEMERINTAH DAERAH DAN KAWASAN INDUSTRI: STUDI KAWASAN INDUSTRI DUMAI (KID)

Rannuh Wijaya Putra

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This study aims to explore the contribution of the Kawasan Industri Dumai (KID) to the Dumai's City Government and analyze the duties and functions of the Dumai City Government in a series of activities between the Central Government and Dumai City Government in Kawasan Industri Dumai (KID) activities. This study used a qualitative method and was conducted in the city of Dumai. This study uses informants as information objects that aim to achieve completeness in getting information. The type of data used in this study are primary data and secondary data obtained through observation and direct interviews with informants. Data analysis in the study was carried out descriptively by explaining the data systematically and objectively so that it can produce factual, actual, and accurate information. Based on the results of this study, things have been found as follows: First, the overall impact of the Kawasan Industri Dumai (KID) activity does not have a progressive contribution to the Dumai City Government, precisely with the Kawasan Industri Dumai (KID) being a detrimental feedback for the Government of Dumai City. The two In the management of industrial development, the Dumai City government does not have the authority to empower its potential efficiently to support the production process for industries in the Kawasan Industri Dumai (KID). Third inability of the Dumai City Government in building good consolidation with the Central Government was utilized by the Central Government to monopolize activities in the Kawasan Industri Dumai (KID).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri kontribusi Kawasan Industri Dumai (KID) terhadap Pemerintah Kota Dumai serta menganalisis tugas dan fungsi Pemerintah Kota Dumai dalam rangkaian kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Dumai pada kegiatan Kawasan Industri Dumai (KID). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan narasumber informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai ketuntasan dalam mendapatkan informasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan. Analisa data dalam penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menjelaskan data secara sistematis dan objektif sehingga dapat menghasilkan informasi yang faktual, aktual, dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian ini telah ditemukan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Secara keseluruhan dampak dari kegiatan Kawasan Industri Dumai (KID) tidak memiliki kontribusi yang progresif terhadap Pemerintah Kota Dumai, justru dengan adanya Kawasan Industri Dumai (KID) menjadi umpan balik yang merugikan bagi Pemerintah Kota Dumai. *Kedua* Dalam pengurusan pembangunan kawasan industri pemerintah Kota Dumai tidak memiliki wewenang dalam memberdayakan potensinya secara efisien untuk mendukung proses kegiatan produksi bagi industri yang ada di Kawasan Industri Dumai (KID). *Ketiga* ketidakmampuan Pemerintah Kota Dumai dalam membangun konsolidasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat untuk memonopoli kegiatan pada Kawasan Industri Dumai (KID).

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kota Dumai, Kawasan Industri, KID

PENDAHULUAN

Potensi Kawasan Industri Dumai (KID). Kawasan Industri Dumai (KID) ini memiliki potensi besar, jika pemerintah daerah mampu melihat peluang kemudian mengupayakan dan mengoptimalkannya dengan strategi-strategi dan perhitungan yang sistematis maka akan menimbulkan titik pendapatan baru bagi daerah. Kota Dumai, dikenal sebagai kota minyak maka terdapat tiga industri yang turut serta me-

majukan Dumai secara tidak langsung yaitu: PT. CPI (dahulu Caltex Pacific Indonesia sekarang Chevron Pacific Indonesia) yang bergerak mayoritas dalam bidang pertambangan dan ekspor minyak dan gas bumi, kemudian PT. Pertamina yang bergerak dalam bidang pengolahan dan pendistribusian minyak dan gas bumi dalam negeri serta disusul oleh industri pengolahan minyak sawit *Coconut Palm Oil (CPO)* PT. BKR (Bukit Kapur Reksa).

Salah satu kawasan industri ini telah menjadi kawasan industri yang paling pesat kemajuannya di Provinsi Riau yakni Kawasan Industri Pelintung, di kawasan industri ini telah dibangun fasilitas seperti: satu dermaga ekspor dengan kapasitas tiga kapal tanker sekali sandar, telah dibangun juga pabrik pupuk NPK dan telah berproduksi, yang diyakini menjadi pabrik pupuk NPK terbesar di Asia Tenggara.

Kawasan Industri Dumai (KID) memiliki potensi geografis pada sisi maritim yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Dumai, yaitu: Pelabuhan Dumai yang memiliki akses jalur perdagangan berdekatan dengan Selat Malaka, selat ini merupakan selat tersibuk nomor dua didunia, dengan melihat potensi dan peluang ini, pelabuhan Dumai dapat menjadi poros maritim, dan jika Pelabuhan Dumai dapat melaksanakan peran dalam memanfaatkan posisinya sebagai jalur tol laut (*high way*) di Asia Tenggara yang berhadapan dengan tiga negara seperti, Malaysia, Singapura, dan Thailand, maka harga barang akan stabil dan dapat menyeimbangkan serta meningkatkan perekonomian di Kota Dumai.

Kota Dumai juga memiliki keunggulan yang komprehensif dan daya tarik sendiri, dengan garis pantai yang panjang dan dalam serta dilindungi oleh Pulau Rupat sebagai *break water* alami, hal ini sangat menguntungkan bagi Pelabuhan Dumai, kedalaman lautnya selalu terjaga sehingga dapat disinggahi oleh kapal-kapal tanker bertonase tinggi. Keseluruhan pelabuhan Dumai memiliki kedalaman laut pelayaran rata-rata 10 sampai dengan 15 meter disaat surut terendah dengan alur pelayaran yang dapat dilintasi oleh kapal-kapal besar dan dapat disandari kapal tanker dengan bobot 20.000 hingga 50.000 DWT. Dalam Kawasan Industri Dumai (KID) yang seluas 1.000 hektare, telah dilengkapi dengan jetty dermaga, pembangkit listrik, terminal *bulking palm oil*, tanki, pengolahan air bersih, dan pengolahan limbah, dengan berdirinya infrastruktur dan sarana pendukung ini akan memudahkan kalangan investor untuk membangun pabriknya di Kawasan Industri Dumai (KID).

Total investasi Kawasan Industri Dumai (KID) ini mencapai Rp 7 triliun, dana ini digunakan mulai dari pembebasan lahan sampai pembangunan fasilitas pendukung, besarnya dana yang dikucurkan tidak terlepas dari keinginan perusahaan untuk menjadikan kawasan industri yang berstandar internasional, dengan fasilitas jetty yang mempunyai panjang 600 meter dan bersertifikat *International Ship and Port Facility Security (ISPS)* maka pelabuhan Kawasan Industri Dumai (KID) dapat disinggahi kapal internasional dan bersandar didermaganya.

Melihat prospek potensi lahan dan kondisi geografis kemaritiman Pelabuhan Kota Dumai sebagai kawasan industri maka untuk merealisasikan potensi dan mengurangi hambatan dalam membangun Kawasan Industri Dumai (KID), salah satu inisiatif yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Industri adalah skema integrasi industri hulu-hilir, skema ini bertujuan untuk menumbuhkan industri di Indonesia yang implikasinya sampai pada titik pertumbuhan ekonomi, skema integrasi ini dimulai dari bahan baku, proses produksi, jasa terkait hingga menjadi produk akhir, bahkan sampai pada daur ulang produk industri tersebut, skema ini dirancang untuk meningkatkan daya saing Kawasan Industri Dumai (KID), oleh sebab itu untuk mendukung skema integrasi ini maka pemerintah pusat mendesain konsep Kawasan Ekonomi Hijau (*Green Economic Zone*).

Dari poin utama yang melatar belakangi penelitian ini terkait dengan prospek potensi Kawasan Industri Dumai (KID) yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan dan skema pembangunan Kawasan Industri Dumai (KID), maka penulis menilai bahwa dari potensi yang di dukung dengan kebijakan pemerintah pusat ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kota Dumai, yang mana pada tahun 2015 kondisi keuangan Kota Dumai mengalami kelesuan atau krisis disemua struktur yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

METODE

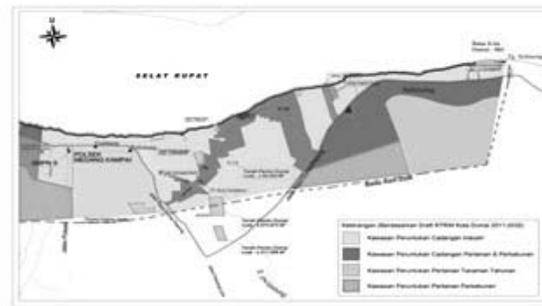
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data kualitatif lebih condong dapat membimbing penulis untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru, data tersebut membantu penulis untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Istilah data menunjuk pada ukuran atau observasi aktual tentang hasil dari suatu investigasi survei, atau hasil observasi yang dicatat dan dikumpulkan, baik dalam bentuk angka ataupun jumlah dan bentuk kata-kata atau pun gambar, disebut data.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Ketika kegiatan pengumpulan data data dilakukan, penulis mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya, dan metode pencarian ulang yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Lahan Kawasan Industri

Salah satu langkah yang mendukung pembangunan adalah Identifikasi sektor andalan yang merupakan tahap awal bagi pemerintah daerah untuk memahami sektor-sektor mana yang memiliki potensi untuk dikembangkan, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor. Dengan melakukan inventarisasi asset daerah, maka pemerintah daerah dapat mengkalkulasikan pola atau metode arah pembangunan di daerah.



Sumber : Paparan Walikota tentang Kawasan Industri Dumai

Pada gambar diatas dapat diidentifikasi tentang tiga bagian lahan yang berada dalam Kawasan Industri Dumai (KID), in-detifikasi lahan ini berdasarkan draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2032, bahwa luas lahan secara keseluruhan mencapai 3.829,19 Ha, dari total keseluruhan ini 1.860 Ha dikuasai oleh perusahaan, 1.969 Ha lahan yang tersedia, dan 179,2 Ha merupakan lahan milik Pemerintah Kota Dumai yang dibagi menjadi 5 kapling tanah dengan luas masing-masing (77.941m², 90.000m², 674.873m², 311.009m², dan 413.500m²), Kawasan Industri Dumai (KID) memiliki kawasan cadangan industri sebesar 1.288,88.

Dengan masih banyaknya lahan yang masih tersedia maka Kawasan Industri Dumai (KID) masih mampu menampung unit usaha industri untuk setiap investor yang ingin terlibat pada iklim investasi di Kawasan Industri Dumai (KID). Kemudian untuk mendukung distribusi hasil produksinya Kawasan Industri Dumai (KID) memiliki fasilitas dermaga yang sangat potensial terhadap posisi geografis Kota Dumai yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka.

Posisi Geografis Pelabuhan

Selain potensi lahan yang luas Kawasan Industri Dumai (KID) juga memiliki potensi geografis pada sisi maritim yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Dumai, yaitu Pelabuhan Dumai.



Sumber : Paparan Walikota tentang Kawasan Industri Dumai

Pada gambar *portmap* pelabuhan Dumai dibagi dalam empat kawasan pelabuhan, yaitu: Pelabuhan Lubuk Gaung, Pelabuhan *Dock Area*, Pelabuhan Kota, dan Pelabuhan Pelintung. Pada setiap pelabuhan ini terdapat beberapa perusahaan yang memiliki fasilitas dermaga sebagai sarana pendukung untuk mendistribusikan hasil produksi dan Pemerintah Kota Dumai, TNI-AL serta Pelindo sebagai instansi negara juga terlibat dalam kegiatan Pelabuhan Dumai.

Posisi geografis pelabuhan Kota Dumai memiliki jarak yang berdekatan antara Thailand, Malaysia dan Singapura sehingga dari posisi geografis ini Kota Dumai memiliki nilai jual tinggi dalam kegiatan ekspor bagi setiap hasil produksi yang didistribusikan ketiga negara segitiga ekonomi tersebut.

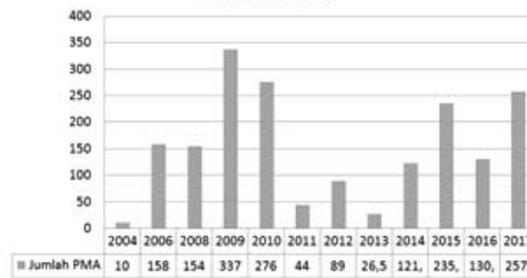
Pertumbuhan Investasi

Dampak dari inventarisasi aset daerah dan kebijakan pemerintah pusat pada pendirian Kawasan Industri Dumai adalah Realisasi Penanaman Modal dan Investasi, hal ini timbul akibat adanya potensi wilayah yang memiliki nilai strategis untuk melakukan kegiatan produksi terhadap industri yang mempunyai kepentingan berdasarkan bentuk produksinya, maka diperlukan nilai modal sebagai langkah awal melakukan pembangunan, sehingga dari dampak nilai modal dan investasi ini akan menghasilkan pendapatan bagi

industri dan pemerintah Kota Dumai.

Penanaman Modal Asing (PMA)

dalam juta dollar (\$)



Sumber : Data olahan penulis berdasarkan dokumen

Grafik ini memberikan informasi terkait dengan pertumbuhan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA)/investasi dalam juta dollar. Dapat dilihat dari grafik ini bahwa pada tahun 2004 mulai tumbuhnya investasi asing dan meningkat pesat hingga tahun 2009 dan kemudian melemah pada tahun 2010 dan turun drastis ditahun 2011, kemudian kembali naik pada tahun 2012 dan melemah lagi pada tahun 2013. Di tahun 2014 investasi asing kembali naik sampai tahun 2015 dan di tahun 2016 kembali menurun. Sampai pada tahun 2017 naik kembali secara progresif, walaupun terjadi fluktuasi pada grafik Penanaman Modal Asing (PMA)/investasi namun secara progresif hal ini dipersentasekan dalam fluktuasi yang tumbuh dan berkembang.

Tenaga Kerja Sektor Industri

Dari pembahasan pada indikator *human resource empowerment* tidak terjadi pembinaan sumber daya oleh pemerintah Kota Dumai secara khusus pembinaan terjadi secara nomatif melalui pendidikan formal yang ada di Kota Dumai, hal ini dikarenakan wewenang terkait pembinaan berada di wilayah provinsi dan Pemerintah Kota Dumai hanya sebagai pengawasan dan pusat pengaduan masalah ketenagakerjaan. Kemudian masalah berikutnya banyaknya penduduk Kota Dumai yang menyelesaikan pendidikan formal pada batas jalur Sekolah Menengah Atas (SMA) maka 30% dari 34% jumlah buruh merupakan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi para lulusan SMA ini. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi pemerintah Kota Dumai karena tenaga pro-

fesional atau lulusan sarjana diambil dari luar Kota Dumai, sehingga dapat diterjemahkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Dumai mengenai perolehan lapangan pekerjaan belum sampai pada titik menengah ke atas.

Posisi Pemerintah pada Kawasan Industri Dumai

Dalam kegiatan industri yang direncanakan dalam RIPIN Pemerintah Kota Dumai hanya mendapatkan posisi pada Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dalam pembagian penguasaan pembangunan kawasan industri pemerintah Kota Dumai tidak memiliki peran dan kehususan dalam memberdayakan potensinya secara efisien untuk mendukung proses kegiatan produksi bagi industri yang ada di Kota Dumai.

Restrukturisasi Fungsi Pemerintah

Restrukturisasi merupakan dampak invokasi atau cara alternatif pemerintah Kota Dumai dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengawas pada kegiatan industri. Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Dumai sebagai pengawas kegiatan kawasan industri tidak terintegrasi dengan baik dalam bentuk pedoman yang diterjemahkan kedalam petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), sehingga berdampak pada pengecilan peran pemerintah daerah Kota Dumai dalam mengembangkan nilai kearifan lokalnya dan secara tidak langsung dampak keterbatasan regulasi dalam merealisasikan dan mengimplementasikan fungsi pengawasan ini tidak menghasilkan dampak yang konstruktif bagi Pemerintah Kota Dumai karena fungsi pengawasan tidak menyentuh konsep

Pemerintah Kota Dumai sebagai wilayah otonom yang berhak atas kewenangannya terhadap segala aktifitas yang berada didaerah untuk mengelola potensi daerah. Hal ini dikarenakan perusahaan harus memberikan laporan langsung kepada Pemerintah Pusat

melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Bentuk pengawasan yang jauh menjengkal Pemerintah Daerah Kota Dumai yang bertumpu pada Provinsi dan Pemerintah Pusat ini tidak sesuai dengan amanah UU No. 3 Tahun 2014. Hal ini bisa berdampak terhadap interaksi moral antara Kawasan Industri terhadap Pemerintah Kota Dumai, karena tidak ada wewenang dalam mengawasi kegiatan industrinya maka perusahaan akan sewenang-wenang terhadap Pemerintah Kota Dumai.

SIMPULAN

Secara keseluruhan dampak dari kegiatan Kawasan Industri Dumai (KID) tidak memiliki kontribusi yang progresif terhadap Pemerintah Kota Dumai. Adanya Kawasan Industri Dumai (KID) justru menjadi umpan balik yang merugikan bagi Kota Dumai mulai dari tidak adanya nilai intensifikasi terhadap sektor-sektor baru bagi pendapatan daerah, sampai kepada keinginan PT. Wilmar untuk menjadi penguasa atas tanah di Kawasan Industri Dumai (KID). Berbagai macam cara untuk menguasai lahan Kawasan Industri Dumai (KID) mulai sertifikasi lahan oleh karyawan PT. Wilmar sampai kepada monopoli akses dermaga yang merugikan perusahaan industri lain. Untuk menghadapi agresivitas PT. Wilmar mekanisme invokasi menjadi strategi bagi Pemerintah Kota Dumai untuk memberikan *pressure* kepada PT. Wilmar agar tidak memonopoli Kawasan Industri Dumai (KID). Namun strategi ini tidak berhasil dengan baik bagi pertumbuhan pendapatan Kota Dumai.

Kemudian dapat disimpulkan dari rangkaian kegiatan antara Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Pusat adalah ketidak mampuan Pemerintah Dumai membangun konsolidasi yang baik dengan Pemerintah Pusat untuk mengelola Kawasan Industri yang sebenarnya merupakan wewenang Pemerintah Kota Dumai. Potensi Kota Dumai yang sangat strategis ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat untuk memonopoli kegiatan Kawasan Industri, sehingga Kota Dumai tidak dapat berperan dalam proses intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

untuk menggali sektor-sektor baru yang meningkatkan pendapatan Kota Dumai. Pertumbuhan industri yang terus meningkat setiap tahunnya, justru menjadi beban bagi Pemerintah Kota Dumai.

DAFTAR RUJUKAN

- A.H. Rahadian, 2016. *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*, Prosiding Seminar Institut Ilmu Sosial STIAMI, ISSN 2355-2883, Volume III, No. 01
- Caporaso, James A. Lenvine. David P., *Teori-teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Damanhuri S. Didin, 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi Bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*, Bogor, IPB Press
- Fhino Andrea Christy, 2009. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*, The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya, 10 Oktober 2009
- Hanly Fendy Djohar Siwu, 2017. *Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Volume 19, No. 3
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Ismi Andari, Lina Sudarwati, 2015. *Dampak Pembangunan Industri Terhadap Diversifikasi Mata Pecaharian, Interaksi Sosial dan Nilai Pendidikan Pada Masyarakat Perdesaan*, Jurnal Persepektif Sosiologi, Vol. 3, No. 1
- Jhingan. M.L, 2013. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Lambang Trijono, 2001. *Strategi Pemberdayaan Komunitas Lokal: Menuju Kemandirian Daerah*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5, Nomor 2
- Leo Agustino, 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta
- Kuncoro Mudrajad, 2000. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Riady Ibnu Kaldun, 2017. *Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Rumpun Laut Indonesia di Pasar Global*, Jurnal Sospol, Vol. 3 No. 1
- Syahrudin , 2010, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Januari 2010
- Siti Aminah, 2011. *NEGARA, PASAR, DAN MASYARAKAT, Sebuah studi sosio-ekonomi dan budaya pengembangan BRT-Transjoharta*. Disertasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Sosiologi. Depok. Januari 2011
- Suparmoko, 2002. *Ekonomi Publik: untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Andi Offset
- Silalahi Ulber, 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama
- Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2009. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bandung, Alfabeta
- Yani Ahmad, 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Whisnu Adhi Saputra, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.